



LAPORAN TRANSPARANSI



PELAKSANAAN TATA KELOLA

2
0
2
4



**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Alamat	JL.MT.Haryono No.07 Sintang
Nomor Telepon	082153161550
Penjelasan Umum	<p>PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tritunggal, yang didirikan pada tahun 2013 dan berlokasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG di BPR Tritunggal mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hal ini sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola. Selain itu, BPR Tritunggal aktif dalam menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK dan asosiasi terkait, seperti Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), guna memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional. Dengan penerapan GCG yang konsisten, BPR Tritunggal berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan layanan keuangan yang terpercaya.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<p>Berdasarkan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Yang Dikaitkan Predikat Komposit Mendapatkan Peringkat 2 Yaitu, Manajemen BPR Telah Melakukan Penerapan Tata Kelola Yang Secara Umum Baik. Hal Ini Tercermin Dari Pemenuhan Yang Memadai Atas Prinsip Tata Kelola. Dalam Hal Ini Terdapat Kelemahan Penerapan Prinsip Tata Kelola, Secara Umum Kelemahan Tersebut Kurang Signifikan Dan Dapat Diselesaikan Dengan Tindakan Normal Oleh Manajemen BPR.</p>

B.PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA
1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK :6171030911850003
	Nama :Titi Wijaya
	Jabatan :Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjadi Koordinator dan Ketua Komite Kredit2. Mengendalikan Funding dan Lending3. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup: tujuan dan nilai-nilai, visi dan misi, sasaran, strategi bisnis, RBB, membuat prediksi tentang kondisi lingkungan mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja, analisis persaingan besar.4. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RUPS maupun diluar RUPS.5. Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja dan Unit Bisnis Strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS.6. Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja yang dipimpinnya.7. Memberikan tugas, arahan, dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.8. Membuat laporan secara periodik kepada/bagi pihak-pihak yang berkepentingan.9. Membina dan menjaga hubungan baik/kerja sama secara positif dengan lembaga lain yang terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah.10. Pencapaian tingkat kesehatan bank yang sehat dan wajar11. Upaya mengoptimalkan laba bank12. Menjaga dan memastikan agar BPR yang dipimpin dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup pendanaan, kredit, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif.13. Melakukan kegiatan pemupukan dan dan pemasaran kredit.14. Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.15. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.16. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.17. Menjamin bahwa laporan kepada Dewan Pengawas telah benar dan dikirim tepat waktu.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2	NIK :6105015610950001
	Nama : Yenni Tresnawati
	Jabatan :Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menatausahakan dan mengkoordinir kegiatan Operasional Bank, terutama yang bersifat internal. 2. Memantau perkembangan likuiditas Bank. 3. Mempersiapkan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga. 4. Mendistribusikan dan memonitor pelaksanaan operasional yang dilakukan staff dan karyawan. 5. Mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian masalah operasional bank untuk dibahas dan diputuskan bersama Direktur Utama dan menetapkan peraturan perusahaan. 6. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup: tujuan dan nilai-nilai, visi dan misi, sasaran, strategis bisnis, rencana kerja dan anggaran tahunan. 7. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RUPS maupun diluar RUPS. 8. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja. 9. Merencanakan pendidikan dan pelatihan pegawai. 10. Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun insentif. 11. Memberikan tugas, arahan, dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan. 12. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ekstern. 13. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan. 14. Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan baik eksternal (UU, Perpu, Keppres, SE, SK departemen terkait) maupun intenal (kebijakan&SOP). 15. Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. 16. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. 17. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan. 18. Menjamin bahwa laporan kepada Direktur Utama telah benar dan dikirim tepat waktu.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi sudah melakukan pemantauan penempatan BPR Tritunggal di BPR Duta Niaga, dan sudah terklaim pada Januari 2025.
2. Terkait pelaksanaan audit Laporan audit dari KAP sudah diterbitkan pada bulan april.
3. Dengan segera berakhirnya masa berlaku sertifikasi Direksi Sdri.Yenni Tresnawati, dan sudah diperpanjang.
4. Mempersiapkan aplikasi perhitungan pencadangan imbalan pasca kerja bagi karyawan BPR, dan pada desember 2024 BPR sudah melakukan pencadangan.
5. Direksi terus mengadakan pelatihan kepada para staff sepanjang tahun 2024 sudah melaksanakan 24 kali pelatihan.
6. Direksi sudah memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit konsumtif elektronik dan sudah menyelesaikan sebanyak 20 NOA.
7. Direksi sudah menjalin komunikasi dengan pihak Sigma dan Bank BNI sehingga Virtual Account sudah efektif digunakan sejak juli 2024.
8. Direksi sudah menjalin komunikasi dengan Pihak Sigma terkait CKPN dan sudah berjalan sejak januari 2025 menggunakan Metode PD:Migration, Lgd: Expected Recoveries.
9. Direksi sudah membuat action plan penyelesaian NPL terbukti NPL Desember 2024 yaitu 0,45.
10. Direksi sudah mencadangkan Imbalan Pasca Kerja desember 2024.
11. Direksi sudah menyusun dan menjadwalkan kegiatan literasi dan inklusi disemester 2 tahun 2024.
12. Direksi sudah memastikan kembali terkait temuan OJK.
13. Direksi sudah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR untuk semester II tahun 2024 kepada Dewan Komisari.
14. Direksi sudah mencadangkan biaya Pengembangan Kualitas SDM minimal 3% dari Biaya Tenaga Kerja di BPR Tritunggal Tahun 2024.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>NIK :6105011909780003</p> <p>Nama :Lukas</p> <p>Jabatan :Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR.2. Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi BPR sesuai Job Desc masing-masing dan Tata Tertib Direksi,3. Pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR;

4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
5. Melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
6. Mengendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) setiap tahun dan melakukan evaluasi pengawasan realisasi RBB setiap semester,
8. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR.
9. Menyetujui atau menolak pemberian fasilitas kredit kepada pihak terafiliasi sesuai Peraturan BPR terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
10. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Auditor Intern, OJK dan KAP secara berkala dan memonitor tindak lanjut Direksi atas penyelesaian LHA.
11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR
 - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR;
 - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR;
 - d. pembinaan dan pengembangan BPR
12. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
13. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS;
14. memimpin rapat Dewan Komisaris;
15. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.

2

NIK :6103010806780001

Nama :Aliudin

Jabatan :Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR,
2. Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi BPR sesuai Job Desc masing2 dan Tata Tertib Direksi,
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR;
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
5. Melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR

6. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) setiap tahun dan melakukan evaluasi pengawasan realisasi RBB setiap semester,
8. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR.
9. Menyetujui atau menolak pemberian fasilitas kredit kepada pihak terafiliasi sesuai Peraturan BPR terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
10. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Auditor Intern, OJK dan KAP secara berkala dan memonitor tindak lanjut Direksi atas penyelesaian LHA.
11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR
 - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR;
 - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR ;
 - d. pembinaan dan pengembangan BPR
12. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS;
13. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi:

1. Meminta Direksi untuk memastikan kembali tentang hal-hal yang mesti dilakukan terkait pemenuhan komitmen dalam temuan pemeriksaan OJK.
2. Direksi diminta untuk memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit konsumtif elektronik.
3. Meminta direksi untuk mempersiapkan sarana dan ketentuan yang mengatur dan termasuk petunjuk teknis penggunaan aplikasi terkait implementasi SAK EP dan perhitungan CKPN di Januari 2025.
4. Direksi diminta untuk melakukan pencadangan biaya bagi kebutuhan pengembangan kualitas SDM tahun 2025 sebesar 3% dari realisasi beban tenaga kerja BPR di tahun 2024.
5. Meminta direksi untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak Sigma dan Bank BNI terkait kerjasama penggunaan virtual akun.
6. Meminta Direksi untuk mengadakan pelatihan kepada para staff baik secara internal maupun pihak eksternal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta peningkatan mutu SDM terutama pelatihan terkait penerapan SAK EP dlm melakukan perhitungan dan pararel run terutama terkait pembentukan CKPN dan pengaruhnya terkait BMPK dan TKS BPR.
7. Direksi juga diminta untuk melakukan pemantauan penempatan BPR di BPR Duta Niaga mengingat mengalami masalah penurunan kualitas aset.
8. Dengan akan berakhirnya masa berlaku sertifikasi Direksi Sdri. Yenni Tresnawati, dihimbau untuk mencari informasi kelas pelatihan penyegaran yang tersedia ke Perbarindo atau lembaga sertif.
9. Direksi mempersiapkan aplikasi perhitungan pencadangan imbalan pasca kerja bagi karyawan BPR termasuk untuk menjajaki kerja sama dengan pihak penyelenggara DPLK supaya BPR sudah melakukan pencadangan dan tidak menjadi temuan audit KAP
10. Terkait pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2023 oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang telah dilaksanakan pada awal Februari kiranya dapat ditanyakan kembali kepada Pihak KAP apakah ada data dan informasi yang masih mereka perlukan lagi mengingat belum terbitnya laporan audit dari KAP.

3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
4.	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada
5.	Komite Lainnya		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Tidak Ada
	Program Kerja	:	Tidak Ada
	Realisasi	:	Tidak Ada
	Jumlah Rapat	:	Tidak Ada

b.Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

C.KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6171030911850003	Titi Wijaya	PT.BPR TRITUNGGAL	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6105015610950001	Yenni Tresnawati	PT.BPR TRITUNGGAL	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6105011909780003	Lukas	PT.BPR TRITUNGGAL	80 %	80 %
2	6103010806780001	Aliudin	PT.BPR TRITUNGGAL	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6105011909780003	Lukas	PT.BPR TRITUNGGAL	80 %	80 %
2	6105011190770002	Thin Sin	PT.BPR TRITUNGGAL	20 %	20 %

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6171030911850003	Titi Wijaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6105015610950001	Yenni Tresnawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6105011909780003	Lukas	-	CV SARANA MAKMUR SENTOSA	60 %
2	6105011909780003	Lukas	-	PT.TRITUNGGAL POULTRY FARM	45 %
3	6103010806780001	Aliudin	-	Tidak Ada	Tidak Ada

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6171030911850003	Titi Wijaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6105015610950001	Yenni Tresnawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6103010806780001	Aliudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6105011190770002	Thin Sin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G.HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1.Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6171030911850003	Titi Wijaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6105015610950001	Yenni Tresnawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6103010806780001	Aliudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6105011909780003	Lukas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6105011190770002	Thin Sin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp.588.000.000	2	Rp.315.000.000
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		Rp.588.000.000		Rp.315.000.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasii				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya				
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		Rp.588.000.000		Rp.315.000.000

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,70
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,10
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,64
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,57
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,50

J. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27/03/2024	2	<ol style="list-style-type: none">Meminta direksi untuk melakukan penilaian potensi dan kelayakan bagi BPR dalam upaya meningkatkan status Kantor Kas Kelam untuk menjadi Kantor Cabang dengan melihat pertumbuhan dan peluang penyaluran kredit yang semakin meningkat pada daerah Kantor Kas Kelam termasuk dalam mempersiapkan SDM yang dimiliki baik yang berada di Kantor Kas Pusat agar jika telah didapati waktu yang tepat untuk peningkatan status tersebut persiapan SDM BPR sudah mendukung untuk kebutuhan tersebut.Terkait pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2023 oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang telah dilaksanakan pada awal Februari kiranya dapat ditanyakan kembali kepada Pihak KAP apakah ada data dan informasi yang masih mereka perlukan lagi mengingat belum terbitnya laporan audit dari KAP agar jikalau memungkinkan laporan tersebut dapat diterbitkan di awal bulan April supaya BPR memiliki cukup waktu untuk melakukan pelaporan-pelaporan maupun koreksi pelaporan yang terkait kepada pihak Otoritas dan Kepada pihak lainnya.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Meminta kepada Direksi untuk membuat dan melaksanakan rencana tidak penyelesaian AYDA mengingat masih banyaknya AYDA yang belum terjual yang telah melampaui masa waktu tertentu supaya tidak akan sampai mengurangi modal inti BPR. 4. Direksi juga diminta untuk melakukan pemantauan penempatan BPR di BPR Duta Niaga mengingat kondisi BPR Duta Niaga yang diinfokan mengalami masalah penurunan kualitas aset yang cukup signifikan dan kesulitan likuiditas yang mereka hadapi yang nampak dari pembayaran bunga Deposito (ABP). 5. Dengan akan berakhirnya masa berlaku sertifikasi Direksi an Sdri. Yenni Tresnawati, dihimbau untuk mencari informasi kelas pelatihan penyegaran yang tersedia ke Perbarindo atau lembaga sertifi. 6. Direksi mempersiapkan aplikasi perhitungan pencadangan imbalan pasca kerja bagi karyawan BPR termasuk untuk menjajaki kerja sama dengan pihak penyelenggara DPLK supaya BPR sudah melakukan pencadangan dan tidak menjadi temuan audit KAP kedepannya. 7. Meminta Direksi untuk mengadakan pelatihan kepada para staff baik secara internal maupun pihak eksternal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta peningkatan mutu SDM terutama pelatihan terkait penerapan SAK EP yang oleh regulator diharapkan semua BPR dipertengah tahun 2024 dlm melakukan perhitungan da paralel run terutama terkait pembentukan CKPN dan pengaruhnya terkait BMPK dan TKS BPR.
2	30/05/2024	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Direksi untuk segera membuat action plan penyelesaian NPL direkomendasikan oleh KAP dan melaksanakan rencana menjaga kualitas aset sesuai target tahun 2024 2. Melakukan penjualan inventaris yg sudah tidak digunakan namun masih memiliki nilai ekonomis serta melakukan hapus buku untuk inventaris yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. 3. Membentuk Cadangan Imbalan Pasca Kerja sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja dan PA BPR Bab 5 no 9. 4. Segera melakukan penyelesaian AYDA sebagaimana yang diamanatkan oleh POJK no. 33 tahun 2018. 5. Direksi disarankan untuk membuat program penghimpunan dana untuk menambah ketersediaan dana segar bagi BPR mengingat kebutuhan dana yang cukup besar bagi BPR untuk mencapai penyaluran kredit yang ditetapkan dalam RBB tahun 2024. 6. Direksi untuk mempelajari dan mempersiapkan ketentuan internal BPR Untuk mengakomodir perubahan regulasi baru termasuk untuk mensosialisasikan kepada SDM BPR terkait POJK No. 7 Tahun 2024. 7. Meminta kepada Direksi untuk mempersiapkan dan melakukan perubahan RBB tahun 2024 dengan memasukan dalam RBB perubahan atas kemauan BPR tersebut perihal rencana untuk membuka kantor kas di Pontianak pada semester kedua tahun kerja 2024. 8. Direksi diminta untuk segera dan teliti dalam melengkapi data-data yang telah dimintai oleh pihak KPP Pratama Sintang melalui surat permintaan penjelasan atas Data dan keterangan dari BPR terkait pelaporan pajak tahun 2022. 9. Direksi untuk segera menyusun dan menjadwalkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan untuk dilaksanakan pada semester kedua tahun 2024 dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut termasuk juga mempelajari dan menugaskan karyawan yang dibutuhkan untuk membantu kegiatan tersebut dan juga terkait kesiapan pelaporan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan tersebut melalui Sipeduli. 10. Meminta Direksi untuk mengadakan pelatihan kepada staff baik secara internal maupun eksternal melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan Perbarindo Kalbar Kalteng khususnya mengenai ketentuan SAK EP dan Perhitungan CKPN.



3	25/09/2024	2	<ol style="list-style-type: none">1. Mengingatkan kepada Direksi bahwa tantiem serta jasa produksi karyawan tahun kerja 2024 akan diberikan jika Rasio NPL mencapai angka 0,7% diharapkan Direksi untuk fokus pada pencapaian kerja BPR Tritunggal tahun 2024 ini terutama pada penyelesaian kredit bermasalah.2. Direksi diminta untuk memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit konsumtif elektronik diantaranya dengan kembali untuk mengajak toko bekerjasama untuk melakukan penagihan dan melakukan penarikan barang yang dibiayai untuk diuangkan guna menutup sisa kredit debitur yang masih ada dan melakukan hapus tagih terhadap sisa pokok yang tidak dapat ditagihkan lagi dari debitur yang sudah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar sesuai dengan porsi masing-masing antara toko dan BPR menurut yang telah disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.3. Meminta Direksi untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali kerjasama penyediaan kredit bagi nasabah baru pada Toko Rekanan dengan nilai tunggakan pembayaran yang cukup tinggi dibandingkan dengan total pembiayaan pada toko, termasuk jika perlu untuk menghentikan sementara pembiayaan pada Toko Rekanan tersebut sampai nilai tunggakan dibanding dengan total pembiayaan pada toko tersebut sudah turun pada angka yang cukup rendah atau aman menurut Direksi.4. Meminta direksi untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak Sigma dan Bank BNI terkait kerjasama penggunaan virtual akun yang sampai pada saat ini masih terdapat kendala yang belum menemui titik temu antara kemauan BPR dan kesanggupan pihak Sigma dalam menyediakan fitur-fitur sebagaimana yang BPPR inginkan dan juga terkait sistem fee dan kemudian metode penggunaan virtual akun yang BNI sediakan, dengan tidak menutup kemungkinan juga bagi Direksi untuk menjajaki kerja sama dengan pihak lain jika masih memungkinkan yang memiliki penawaran kerja sama yang lebih baik dan sesuai dengan harapan BPR.5. Direksi diminta untuk mempelajari dan melakukan analisa/perbandingan terhadap penawaran kerjasama terkait pengelolaan dana pensiun bagi karyawan dan pengurus BPR Tritunggal oleh pihak DPLK/asuransi yang telah Direksi terima termasuk pengelolaan dana mandiri oleh BPR dari berbagai aspek terhadap keuangan dan kinerja BPR dan supaya dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dapat diputuskan bersama-sama sebagai pilihan pengelolaan yang terbaik bagi BPR dan untuk memenuhi kewajiban BPR terhadap regulasi dan hak-hak ketenagakerjaan yang dimiliki oleh SDM BPR.6. Terkait hasil pertemuan dengan OJK dalam pembahasan mengenai rencana BPR untuk membuka Kantor Kas di Pontianak yang sampai pada saat ini belum ada jawaban pasti dari OJK, maka diminta kepada direksi untuk tidak berkecil hati dan tetap untuk mengusahakan realisasi tersebut pada triwulan ke-4 dengan melakukan peninjauan kembali terkait berkas-berkas maupun pencapaian kinerja keuangan termasuk pendanaan maupun pembiayaan yang baik akan berguna dan menunjang kinerja BPR dalam kesempatan berikutnya terkait rencana pembukaan kantor kas tersebut, termasuk juga dengan mempersiapkan SDM baik di Pusat maupun di kantor kas tersebut nanti jika telah disetujui dan siap untuk beroperasi.7. Meminta Direksi untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Sigma terkait progres penyediaan fasilitas pendukung bagi perhitungan CKPN oleh BPR dan implementasi terkait SAK EP.8. Direksi untuk mempersiapkan sarana dan ketentuan yang mengatur dan termasuk petunjuk teknis penggunaan aplikasi terkait implementasi SAK EP di Januari 2025 termasuk pada pemilihan dan penentuan metode perhitungan CKPN yang cocok untuk diterapkan di BPR Tritunggal dengan mempertimbangkan ketersediaan data pada sistem TI BPR dan metode-metode yang disediakan oleh penyedia jasa TI.9. Untuk terus mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para staff baik secara internal maupun pihak eksternal.
---	------------	---	--



4	10/12/2024	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Direksi untuk memastikan kembali tentang hal-hal yang mesti dilakukan terkait pemenuhan komitmen dalam temuan pemeriksaan OJK dari pemenuhan kewajiban yang paling segera sampai yang terakhir sesuai tanggal batas waktu masing-masing sehingga tidak ada kewajiban yang akan terlewatkan ataupun terlambat untuk dipenuhi. 2. Direksi diminta untuk memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit konsumtif elektronik dengan toko rekanan untuk bersama-sama melakukan penagihan dan menarik barang untuk menutup sisa kredit yang masih berjalan. 3. Meminta direksi untuk mempersiapkan sarana dan ketentuan yang mengatur dan termasuk petunjuk teknis penggunaan aplikasi terkait implementasi SAK EP dan perhitungan CKPN di Januari 2025. 4. Mengusahakan penjualan AYDA yang masih belum terjual. 5. Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahun posisi 2024, dewan komisaris penggunaan jasa dari AP dan Kantor Akuntan Publik KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan. 6. Meminta Direksi untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR untuk semester II Tahun 2024 kepada komisaris setelah habisnya masa kerja tahun 2024. 7. Dengan berlakunya POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan kualitas SDM bagi BPR dan BPRS, maka Direksi diminta untuk melakukan pencadangan biaya bagi kebutuhan pengembangan kualitas SDM tahun 2025 sebesar 3% dari realisasi beban tenaga kerja BPR di tahun 2024.
---	------------	---	---

K. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	6105011909780003	Lukas	4	-	100 %
2.	6103010806780001	Aliudin	4	-	100%

L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Telah Diselesaikan		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada

M. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
Total	Tidak Ada	Tidak Ada

N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
TIDAK ADA									

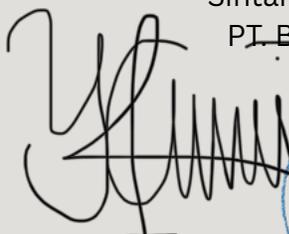
O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP	Jumlah (Rp)
1	09/03/2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan Gemilang Inkubasi Usaha Lestari yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2024 di Aula Hotel Bagoes, kegiatan ini merupakan acara showcase produk peserta Gemilang Inkubasi Usaha Lestari untuk mempromosikan dan mendukung produk usaha lestari di kabupaten Sintang dengan unsur lokal, serta meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya lokal.	PT.Semesta Sintang Lestari	-	Rp.2.500.000,-
2	03/12/2024	Kegiatan Sosial	Dalam Rangka HUT BPR Tritunggal yang ke-10 tahun segenap dewan komisaris, direksi dan karyawan melaksanakan Bakti Sosial Ke Panti Asuhan Bhakti Luhur.	Panti Asuhan Bhakti Luhur	-	Rp.4.000.000

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP	Jumlah (Rp)
3	03/12/2024	Kegiatan Sosial	BPR Tritunggal memberikan bantuan dana untuk acara HUT Gereja Katolik Kristus Raja Katedral Sintang yang ke-92 Tahun	Gereja Katolik Kristus Raja Katedral Sintang	-	Rp.5.000.000

Sintang, 17 April 2025

PI BPR Tritunggal



Yenni Tresnawati
Direktur Utama




Lukas
Komisariss Utama